



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan izin usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Timur perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal, SH, MH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Timur Nomor 61);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- e. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- f. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- g. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
- h. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- i. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terkait dengan batas administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;

- j. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
- k. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
- l. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya; dan
- m. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini hanya mengatur kegiatan usaha pertambangan di dalam wilayah usaha pertambangan WUP.
- (2) Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang yang terdiri dari :
  - a. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan
  - b. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batukali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan sebagai pedoman dan upaya pengendalian pelaksanaan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan kepastian penyelenggaraan perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah melalui kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB IV  
PROSEDUR PERIZINAN

Bagian kesatu

Kewajiban dan Tahapan

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Timur diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubernur.
- (2) IUP diberikan melalui tahapan :
  - a. Pemberian WIUP; dan
  - b. Pemberian IUP.

Bagian Kedua

Pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan)

Pasal 6

- (1) WIUP adalah wilayah di dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Ketiga  
Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan)  
Pasal 7

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V  
SYARAT IZIN  
Bagian Kesatu  
Syarat WIUP  
Pasal 8

Untuk memperoleh WIUP, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Perorangan :
  1. Fotocopy KTP;
  2. NPWP Kaltim;
  3. Daftar tanah lengkap dengan Peta dan Koordinat Rencana WIUP;
  4. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP; dan
  5. Surat Keterangan Domisili;
- b. Koperasi / badan usaha :
  1. Fotocopy KTP;
  2. NPWP Kaltim;
  3. Peta dan Koordinat Rencana WIUP;
  4. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP;
  5. Surat Keterangan Domisili Akte pendirian perusahaan (badan usaha) dan/atau akte Pendirian (Koperasi) yang bergerak di usaha pertambangan;
  6. Susunan pengurus(koperasi), Susunan direksi & daftar pemegang saham (badan usaha);
  7. Neraca Perusahaan; dan
  8. Daftar peralatan yang dimiliki.

Bagian Kedua  
Syarat IUP Eksplorasi  
Pasal 9

Untuk memperoleh IUP Eksplorasi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya penetapan WIUP, dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Penetapan WIUP;
- b. Peta WIUP;
- c. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan / Geologi atau tenaga ahli lain yang berpengalaman minimal 3 tahun di bidang pertambangan (dilengkapi KTP);
- d. Bukti pembayaran biaya Pencadangan Wilayah & Pencetakan Peta WIUP;
- e. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
- f. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup;
- g. Surat Pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan; dan
- h. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi setelah proses eksplorasi selesai (bagi pemohon IUP eksplorasi mineral bukan logam).

Bagian Ketiga  
Syarat IUP Operasi Produksi  
Pasal 10

Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Peta Wilayah sesuai kaidah SIG nasional;
- b. Laporan lengkap eksplorasi;
- c. Laporan Studi Kelayakan;
- d. Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang;
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB);
- f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi;
- g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan/geologi, atau tenaga ahli lain yang berpengalaman minimal 3 tahun di bidang pertambangan (dilengkapi KTP);
- h. Laporan keuangan tahun Terakhir;
- i. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan Lingkungan Hidup;
- j. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi;
- k. Surat pernyataan kesanggupan memasang tanda/ patok batas lahan; dan
- l. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup.

BAB VI  
KETENTUAN IZIN  
Bagian Kesatu  
Ketentuan WIUP  
Pasal 11

- (1) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi mineral bukan logam :
  - a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar; dan
  - b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi batuan :
  - a. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar; dan
  - b. Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (3) Sesuai dengan kondisi dan potensi komoditi pertambangan didaerah, maka dapat dilakukan penyesuaian batasan luas WIUP kepada pemegang IUP di Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi berkewajiban melakukan tata batas selambat-lambatnya satu bulan setelah IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (5) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) harus mempertimbangkan dan memenuhi ketentuan :
  - a. mendapat pertimbangan khusus atas tanggung jawab berupa Pernyataan Pakta Integritas yang merupakan pernyataan pertanggungjawaban dari instansi pemproses dengan Pertimbangan Optimal sumber daya mineral di daerah, Pertimbangan keseluruhan Luasan area tambang kurang dari yang ditentukan pada peraturan pertambangan yang berlaku, Pertimbangan untuk kelangsungan industri eksisting yang membutuhkan area tambang; dan
  - b. pertimbangan teknis dari instansi terkait sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Bagian Kedua  
Ketentuan IUP Eksplorasi  
Pasal 12

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam wajib menempatkan jaminan kesungguhan untuk kegiatan eksplorasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk luasan dibawah 10 hektar, sedangkan luasan 10 hektar lebih besaran jaminan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hektar dalam bentuk Deposito Berjangka atau Bank Garansi pada BPD Kaltim atas nama Gubernur qq. Perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara kepada Gubernur untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Eksplorasi.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi.

### Bagian Ketiga

#### Ketentuan IUP Operasi Produksi

##### Pasal 13

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan ketentuan :
  - a. untuk mineral bukan logam, paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan
  - b. untuk batuan, paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi diterbitkan setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran titipan pajak ke instansi yang berwenang.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan pasca tambang.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali harus mengembalikan IUP Operasi Produksi kepada Gubernur.

### Bagian Keempat

#### Ketentuan Perizinan Khusus

##### Pasal 14

- (1) Untuk komoditas tambang berupa tanah uruk diprioritaskan dan dimanfaatkan di dalam daerah Provinsi karena kebutuhan daerah yang tinggi.
- (2) Jika komoditas tambang izin usaha pertambangan operasi produksi berupa tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diangkut dan dijual ke luar Daerah Provinsi, pemegang IUP harus mengajukan izin penjualan tanah uruk kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Untuk memperoleh izin penjualan tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP mengajukan permohonan kepada Gubernur dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Surat Permohonan bermaterai yang mencantumkan tujuan dan volume tanah uruk yang dijual;
  - b. Bukti status tanah yang digali; dan
  - c. Copy Surat Pemesanan atau Surat Perjanjian Kerja antara pemegang IUP dan pihak pembeli/pemesan.
- (4) Pemegang izin penjualan tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan realisasi penjualan yang dilakukan secara berkala kepada Gubernur.

## BAB VII

### PENGANGKUTAN KOMODITAS TAMBANG

#### Pasal 15

Untuk melakukan pengangkutan dan penyediaan armada transportasi komoditi tambang, sebelum IUP diterbitkan, pemegang IUP harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan yang mencantumkan :

- a. jenis dan jumlah alat transportasi (kendaraan) yang digunakan;
- b. kondisi alat transportasi (harus lulus izin kelayakan kendaraan);
- c. rute perjalanan yang dilalui;
- d. kesesuaian jalan dengan jenis kendaraan yang digunakan; dan
- e. ketentuan dan persyaratan lain yang harus dipatuhi.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pengangkutan komoditas tambang dilakukan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut wajib memiliki izin jasa dibidang Pertambangan.
- (2) Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan komoditas tambang juga meliputi mineral logam dan batubara.
- (3) Dalam hal operasi produksi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan menggunakan pengangkutan keluar area tambang maka harus memiliki ijin bongkar muat.

## BAB VIII

### REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

#### Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui Gubernur mengacu pada peruntukan lahan pasca tambang.
- (2) Peruntukan lahan pasca tambang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dengan peruntukan :
  - a. pemukiman dan kawasan industri;
  - b. tanaman tahunan;
  - c. tanaman pangan lahan basah; dan
  - d. tanaman pangan lahan kering/peternakan.

- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
  - b. rencana pembukaan lahan;
  - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu; dan
  - d. kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir.
- (4) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.
- (5) Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. profil wilayah;
  - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
  - c. rona lingkungan akhir pasca tambang;
  - d. program pasca tambang meliputi : reklamasi yang telah dilaksanakan, pemerliharaan hasil reklamasi, dan pemantauannya;
  - e. jadwal pelaksanaan pasca tambang; dan
  - f. kriteria keberhasilan pasca tambang.

## BAB IX

### JAMINAN REKLAMASI

#### Pasal 18

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh BPD Kaltim atas nama Gubernur qq. Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (3) Evaluasi pelaksanaan reklamasi dilakukan bersama oleh tim Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten.
- (4) Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (5) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (6) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB X  
JAMINAN PASCA TAMBANG

Pasal 19

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh BPD Kaltim atas nama Gubernur qq. Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Gubernur.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.
- (5) Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB XI  
PENCAIRAN DAN PELEPASAN JAMINAN

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya atau pelepasan Jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada Gubernur dengan ketentuan :
  - a. permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi disertai dengan laporan lengkap hasil eksplorasi;
  - b. permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi dan besarnya disesuaikan dengan tingkat keberhasilan reklamasi; dan
  - c. permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Pascatambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang.
- (2) Permohonan pelepasan jaminan disampaikan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (3) Gubernur memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

BAB XII  
PELAPORAN  
Pasal 21

- (1) Pemegang IUP memiliki kewajiban menyampaikan RKAB setiap akhir tahun meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati.

BAB XIII  
PEMERATAAN DAN PENATAAN LAHAN  
Pasal 22

- (1) Kegiatan *cut and fill* (pemerataan dan penataan lahan) dalam rangka pendirian industri, pergudangan, perumahan dan lain-lain harus mengajukan izin kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Kegiatan pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sisa kegiatan *cut and fill* harus mengajukan izin kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan.

BAB XIV  
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
Bagian Kesatu  
WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat)  
Pasal 23

- (1) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Gubernur dalam Wilayah Pertambangan (WP) setelah berkonsultasi dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) WPR harus memenuhi kriteria :
  - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
  - b. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  - c. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
  - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
  - e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;

- f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
  - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh Gubernur kepada Menteri dan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Prosedur IPR

#### Pasal 24

- (1) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik :
- a. Orang perseorangan;
  - b. Kelompok masyarakat; dan
  - c. Koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan :
- a. Kartu Tanda Penduduk (perorangan/kelompok masyarakat) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (koperasi);
  - b. Bagi koperasi, akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Komoditas tambang yang dimohon;
  - d. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat;
  - e. laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir (hanya bagi koperasi setempat); dan
  - f. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa
  - g. a pemohon :
    - 1. menggunakan pompa mekanik atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
    - 2. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

#### Bagian Ketiga

#### Ketentuan IPR

#### Pasal 25

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
- a. orang perseorangan, paling banyak 1 (satu) hektar;
  - b. kelompok masyarakat, paling banyak 5 (lima) hektar; dan
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah.

- (4) Pemegang IPR wajib untuk :
  - a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
  - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
  - c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
- (5) Gubernur menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR.
- (6) Pemegang IPR bersama Gubernur melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## BAB XV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dilakukan bersama-sama oleh Tim Pokja Pertambangan yang terdiri dari :
  - a. Dinas Pertambangan dan Energi;
  - b. Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah;
  - c. Kantor Polisi Pamong Praja;
  - d. Badan Lingkungan Hidup;
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
  - f. Dinas Perhubungan;
  - g. Dinas Pendapatan Daerah; dan
  - h. Camat dan Kepala Desa setempat.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang IUP wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 27

Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir serta wajib :

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2015; dan
- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin kepada Gubernur.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Februari 2015  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Februari 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19620527 198503 1 006